

Jurnal DINAMIKA HAM

**Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat**
Heru Susanto

Tanggung Jawab Kejahatan Perorangan
Sumaryo Suryokusumo

**Pemanfaatan Internet untuk Penyebaran Isu-Isu
Hak Asasi Manusia**
Hendro Margono

**Tinjauan Perundang-Undangan di Bidang
Kewarga-negaraan Berkaitan dengan Prinsip
Anti Diskriminasi**
Hafidz Abbas

**Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kejahatan
Transnasional dalam Bentuk Trafiking
Perempuan**
(Kasus Trafiking Perempuan dari Indonesia ke Malaysia)
Imam Agus Riyadi

**Efektivitas *Hybrid Tribunal* dalam Menangani
Kasus Kejahatan Berat Terhadap Kemanusiaan
di Timor Leste**
Benicia Eriana

Resensi Buku : Media Menoropong Perempuan
Bambang Widjanarko

ISSN 1410-3982 | Vol.6 Nomer 2, Mei 2006

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Yoan Nursari Simanjuntak, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Edisi ini memuat enam makalah dan beberapa resensi buku. Makalah-makalah yang kami pilih untuk edisi ini beraneka ragam, tetapi semuanya berkaitan dengan masalah HAM. Sedangkan resensi buku kami pilih buku-buku yang membahas hak asasi manusia dan gender. Dalam hal ini buku-buku terbitan Konsorsium Suara Perempuan (KSP) kami resensi untuk mengapresiasi dan menyebarluaskan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia.

Tulisan pertama, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat," oleh Heru Susanto, membahas soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tulisan ini dimulai dengan konsep HAM, konsep pelanggaran HAM dan konsep pelanggaran HAM berat, serta hakikat rekonsiliasi. Penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi di samping penyelesaian secara litigasi, yaitu melalui proses peradilan, sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan HAM berdasarkan UU 26/2000. Tulisan ini membahas juga soal: Apakah dengan cara penyelesaian secara rekonsiliasi tersebut sudah cukup memberikan keadilan bagi pihak yang menjadi korban dari Pelanggaran HAM tersebut? Apakah hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk impunitas yang terselubung bagi para pelaku Pelanggaran HAM di Indonesia? Tulisan memberikan pemahaman secara menyeluruh atas penyelesaian dari Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh pihak yang berkuasa, karena memang terjadinya Pelanggaran HAM tersebut tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan penguasa atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan masyarakat sipil sebagai sasaran obyeknya.

Tulisan kedua, "Tanggung Jawab Kejahatan Perorangan" oleh Sumaryo Suryokusumo, membahas tanggungjawab individual pada kejahatan hak asasi manusia. Individu yang menjawab sebagai atasan atau komandan harus bertanggungjawab secara individual karena memberi perintah bawahannya untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Atasan atau komandan harus juga bertanggungjawab secara individual karena gagal mencegah atau menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tidak bertanggungjawab terjadi ketika atasan mengetahui dan punya alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia tetapi gagal untuk melakukan tindakan yang seharusnya untuk mencegah atau menghindari pelanggaran itu.

Tulisan ketiga, "Pemanfaatan Internet untuk Penyebaran Isu-isu Hak Asasi Manusia" oleh Hendro Margono, membahas ikhwal peranan dan fungsi internet dalam menyebarkan isu-isu hak asasi manusia. Tulisan ini berasumsi bahwa internet telah menjadi alat sangat berguna dalam transformasi penggunaan informasi sekitar hak asasi manusia. Kendati masih sedikit orang yang menggunakannya, internet bagaimana pun menjadi medium amat penting dalam tahun-tahun terakhir ini. Dengan mempertimbangkan arti pentingnya internet, pemerintah dan LSM mesti mengembangkan teknologi untuk membantu menyukseskan kampanye anti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komputerisasi membantu proses transfer informasi secara cepat dan luas. Namun, internet dan komputerisasi juga mempunyai keterbatasan, yaitu bisa memuat dan mengirim informasi apa saja. Oleh karenanya, pemerintah, LSM dan pegiat hak asasi manusia harus melakukan seleksi informasi yang akurat dan yang benar.

Tulisan keempat, "Tinjauan Perundang-Undangan di Bidang Kewarganegaraan Berkaitan dengan Prinsip Anti Diskriminasi" oleh Hafidz Abbas membahas soal aspek-aspek hukum kewarganegaraan. Tulisan ini didasari asumsi bahwa globalisasi meningkatkan mobilitas warga melewati batas-batas negara, sehingga problem-problem sosial, psikologis, dan hukum berkaitan dengan status kewarganegaraan meningkat. Masih ada beberapa diskriminasi dan peraturan-peraturan yang bias gender yang harus direformasi dalam era globalisasi ini. Tulisan ini menyarankan bahwa dalam era reformasi ini, Indonesia memerlukan undang-undang tentang kewarganegaraan yang lebih baik dan lebih adil serta sesuai dengan nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip antidiskriminasi.

Tulisan kelima, "Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kejahatan Transnasional dalam Bentuk Trafiking Perempuan: Kasus Trafiking Perempuan dari Indonesia ke Malaysia" oleh Imam Agus Riyadi membahas bagaimana kelompok-kelompok pelaku kejahatan transnasional melakukan aksinya terhadap para pekerja perempuan Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi permasalahan kasus-kasus trafiking perempuan dari Indonesia dan Malaysia dengan cara melakukan upaya-upaya dalam bentuk pencegahan dan hukuman secara legal terhadap mereka yang melakukannya. Sayangnya, upaya-upaya itu tidak efektif untuk mengatasi problem kejahatan transnasional. Ketidakefektifan itu disebabkan oleh kondisi Indonesia yang miskin secara ekonomis, lemah dalam pengawasan, kuatnya korupsi, dan tidak efektifnya aparat pemerintah.

Pengantar Redaksi

*Tulisan Keenam, “Efektivitas Hybrid Tribunal dalam Menangani Kasus Kejahahatan Berat terhadap Kemanusiaan di Timor Leste” oleh Benicia Eriana membahas upaya PBB untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor setelah jajak pendapat. Upaya itu adalah dengan membentuk *hybrid tribunal* sesuai Resolusi DK PBB No 1272. Tulisan ini menjelaskan bahwa upaya PBB dengan *hybrid tribunal* itu tidak efektif, terutama dalam proses investigasi dan penuntutan.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Heru Susanto | 107 |
| Tanggung Jawab Kejahatan Perorangan Sumaryo Suryokusumo | 124 |
| Pemanfaatan Internet untuk Penyebaran Isu-Isu Hak Asasi Manusia Hendro Margono | 130 |
| Tinjauan Perundang-Undangan di Bidang Kewarganegaraan Berkaitan dengan Prinsip Anti Diskriminasi Hafidz Abbas | 136 |
| Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kejahatan Transnasional dalam Bentuk Trafiking Perempuan (Kasus Trafiking Perempuan dari Indonesia ke Malaysia) Imam Agus Riyadi | 162 |
| Efektivitas <i>Hybrid Tribunal</i> dalam Menangani Kasus Kejahatan Berat Terhadap Kemanusiaan di Timor Leste Benicia Eriana | 181 |
| Resensi Buku : Media Menoropong Perempuan Bambang Widjanarko | 197 |

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Heru Susanto¹

Abstract: *Act No 26 of 2000 on Human Rights Court substantially deals with gross human rights violations, and also with juridical solution of such violation. However, there is an alternative solution, which is reconciliation of gross human rights violation happened in the past. Reconciliation solution is done by the National Commission of Truth and Reconciliation as an extra judicial institution. This paper exposes that the commission has been doing its jobs through some steps, such as truth unveiling, mistakes confession, giving apology, peace, rule of law, amnesty and rehabilitation to those committed human rights crimes in the past.*

Keywords: *Commission of Truth and Reconciliation, gross human rights violations, amnesty, compensation.*

Pengantar

Problematika Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam pasal 47 ditentukan: (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, maka tidak setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pelanggaran HAM) selalu diselesaikan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), khususnya yang menyangkut kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu, yaitu yang menyangkut kasus-kasus sebelum berlakunya UU 26/2000. Selanjutnya sebagai perintah dari ayat 2 telah pula dibentuk kelembagaan yang disebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Melihat penamaan kelembagaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa

1) Heru Susanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi di samping penyelesaian secara litigasi, yaitu melalui proses peradilan, sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan HAM berdasarkan UU 26/2000. Persoalannya sekarang adalah, apakah dengan cara penyelesaian secara rekonsiliasi tersebut sudah cukup memberikan keadilan bagi pihak yang menjadi korban dari Pelanggaran HAM tersebut? Dan apakah hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk impunitas yang terselubung bagi para pelaku Pelanggaran HAM di Indonesia?

Oleh karena itulah di dalam pembahasan tulisan ini perlu dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan: Hak asasi manusia pada umumnya dan Pelanggaran HAM, Hakikat rekonsiliasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Dengan mengemukakan hal-hal tersebut diharapkan tulisan ini memberikan pemahaman secara menyeluruh atas penyelesaian dari Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh pihak yang berkuasa, karena memang terjadinya Pelanggaran HAM tersebut tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan penguasa atau organisasi dalam menjalankan aktivitas-nya yang berhubungan dengan masyarakat sipil sebagai sasaran obyeknya.

HAM pada Umumnya dan Pelanggaran HAM Berat

Hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya di dalam pengertian tersebut dijelaskan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun (konsiderans huruf a UU 26/2000).

Perjuangan penegakan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak-Hak Asasi dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits l'Hommes et du Citoyen*) 1789 di Perancis (Effendi, 2005: 39). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1: Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.
2. Pasal 2: Tujuan negara melindungi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebendaan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

Tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* Virginia lewat amandemen yang terkenal, Amandemen Pertama, melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat. Amandemen Keempat, melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. Amandemen Kelima, larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Pengakuan hak asasi manusia di abad modern dipertegas kembali oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang disampaikan pada tahun 1941 yang dikenal dengan *Four Freedoms*, yaitu: (1) *Freedom to speech* (kebebasan berbicara), (2) *Freedom to religion* (kebebasan beragama), (3) *Freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan), dan (4) *Freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan).

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, dalam pasal 2 disebutkan: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain."

Dan selanjutnya baru tahun 1966 sidang umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Culture Rights*) serta perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). Sementara itu diperlukan waktu sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku (Budiardjo, 1989: 122).

Seperti juga negara-negara berkembang lainnya, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang Undang Dasarnya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar berikutnya. Hak hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal.

Selanjutnya Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan atau *machtsstaat*/ negara penindas (Budiardjo, 1989: 127). Apa yang dikatakan oleh Hatta dapat dimengerti, mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), jadi segala sesuatunya tunduk pada hukum yang berlaku.

**Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat**

Pada waktu pertama kali dicantumkan dalam UUD 1945 masalah hak-hak asasi manusia pengaturannya tidak terlalu lengkap, karena UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan Hak-hak Asasi Manusia diterima oleh PBB (sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights). Namun setelah terjadinya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat, persoalan hak asasi manusia sudah dilengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara mondial.

Sebagai realisasi organikya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapa pun.

Kemudian selanjutnya disebutkan, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh

negara Republik Indonesia.

Demikian pula untuk melengkapi pengertian hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU 39/1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun Soetandyo Wignjosoebroto (2002: 436) mendefinisikan tentang hak asasi manusia, yaitu: "hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliahkan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada, apalagi dirampas oleh siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan negara sekali pun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat."

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Wignjosoebroto, 2002: 436).

Jadi sesungguhnya pemahaman tentang hak asasi manusia merupakan upaya perlindungan dan pengakuan yang harus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, namun disisi lain juga harus diperhatikan adanya kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan berbicara tentang Pelanggaran HAM sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang secara substansial menyangkut pengertian Pelanggaran HAM. Apabila memperhatikan substansi UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang

mempunyai kewenangan mengadili Pelanggaran HAM, maka yang paling esensiil adalah menyangkut pengertian tentang Pelanggaran HAM, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7, yaitu: (a) Kejahatan genosida, dan (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan pasal 7 bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma). Oleh karena itu sesungguhnya ketentuan yang ada di dalam UU 26/2000 banyak mengadopsi ketentuan yang berasal dari Statuta Roma sepanjang sesuai dengan kepentingan Indonesia. Kedua jenis kejahatan tersebut di atas merupakan bagian dari kejahatan internasional, yang secara keseluruhan terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, kesemuanya itu menjadi yuridiksi dari Pengadilan Kejahatan Internasional/International Criminal Court (Robertson, 2000: 409).

Pelanggaran HAM merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengadilan HAM Permanen dan Ad Hoc

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pelanggaran HAM, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang macam pengadilan HAM, yaitu yang terdiri dari pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM permanen diperuntukkan untuk mengadili pelanggaran HAM sesudah berlakunya UU 26/2000, sedangkan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU 26/2000.

Mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc ditentukan dalam pasal 43, yaitu:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;
2. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;
3. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa terhadap setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia senantiasa akan dilakukan penegakkan hukum sebagaimana yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM di Indonesia harus diproses menurut hukum, tapi juga tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya menurut cara nonlitigasi, yaitu berdasarkan rekonsiliasi, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 47 UU 26/2000.

Proses awal penegakkan hukum pelanggaran HAM dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 dan selanjutnya dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

Proses penyidikan pelanggaran HAM dilakukan oleh Jaksa Agung, sebagaimana ditentukan dalam pasal 21. Dan selanjutnya proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat setelah diangkat oleh Jaksa Agung.

Selanjutnya dari hasil penyidikan yang telah dianggap cukup, maka dilakukanlah proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) yang menentukan: Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dengan demikian selesailah sudah proses penegakkan hukum pelanggaran HAM menurut UU 26/2000.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM. Pengadilan ini berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar. Tiap-tiap Pengadilan HAM yang dibentuk di kota-kota tersebut meliputi wilayah hukum sendiri.

Dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu mengenai:

1. Kejahatan berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

2. Asas retroaktif bagi pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut
3. Asas tanggungjawab individual terhadap kejahatan (*individual criminal responsibility*)
4. Hukuman mati (*capital punishment*)
5. Pemberian dasar hukum bagi Komnas HAM sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan secara pro justicia
6. Pelaku pelanggaran HAM berat dengan batas umur 18 tahun tidak menjadi subyek hukum dalam undang-undang tersebut (Suryokusumo, 2004: 11).

Pelanggaran HAM menurut pasal 7 UU 26/2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM tersebut bukan semata-mata masalah hukum (*legally heavy*) tetapi juga sarat dengan masalah politik (*politically heavy*) yang tidak identik dengan kejahatan biasa (*ordinary crimes*).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Unsur-unsur pelanggaran HAM yang merupakan yurisdiksi UU 26/ 2000 adalah kejahatan genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Menurut pasal 8 UU 26/2000, yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 UU 26/2000 adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Pasal tersebut di atas tampaknya berusaha mengakomodasi segala bentuk pelanggaran HAM kategori kedua yang berkaitan dengan serangan secara meluas dan sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil. Karenanya, setiap jenis kejahatan terhadap

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

kemanusiaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang selalu terkait dengan serangan meluas dan sistematis (Bagir Manan, 2001:95).

Selanjutnya yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Dengan demikian sesungguhnya yang termasuk kedalam pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dengan undang-undang adalah sudah sangat rinci. Namun yang lebih menentukan adalah adanya kebijakan atau kelanjutan kebijakan dari penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, karena hal ini yang akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM.

Hakikat Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM

Salah satu mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu adalah dengan menggunakan rekonsiliasi sebagaimana yang dikenal di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan dan region Amerika Latin, di mana pembentukan KKR-nya nyaris setelah reformasi politik terjadi. Rentang waktu yang cukup panjang ini melanggar pakem prinsipil peran KKR, yaitu menarik garis antara praktik keji masa lalu dengan harapan damai di masa depan dan

memisahkan antara para pelaku yang bertanggungjawab atas kekerasan masa lalu dengan kelompok pembaharu yang bersih dari rekam jejak masalah di masa lalu (Laporan HAM, 2005 :12).

Apakah yang dimaksud dengan komisi kebenaran? Sebenarnya tidak ada definisi yang baku mengenai komisi kebenaran ini. Namun sebagaimana pendapat Priscilla Hayner, yang dikutip Sulistiyanto (2003), terdapat empat elemen yang penting pada sebuah komisi kebenaran. Pertama, komisi kebenaran haruslah berfokus pada masa lalu. Kedua, komisi kebenaran dibentuk untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai kejahatan terhadap hak asasi manusia pada sebuah periode waktu dan tidak terfokus hanya pada satu kejadian spesifik. Ketiga, komisi ini dibentuk untuk satu periode waktu yang spesifik dengan tujuan spesifik dan akan dibubarkan setelah komisi ini mengeluarkan laporan finalnya. Keempat, komisi kebenaran memiliki kekuasaan dan otoritas tingkat tinggi bagi akses informasi pada setiap institusi pemerintah dan untuk menjamin keamanan para saksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran dengan mengacu pendapat dari filosof Jerman Jurgen Habermas (Sulistiyanto, 2003), ada tiga aspek yang terdapat pada kebenaran. Pertama, kebenaran haruslah berhubungan dengan yang benar-benar terjadi dan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

nyata. Fakta adalah elemen utama pada kebenaran. Kedua, kebenaran haruslah didampingi dengan sebuah sistem normatif, baik korban maupun pelaku dapat mengajukan pembenaran tentang cerita mereka masing-masing. Sebagai contoh, mereka mengetahui bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai kriminal ketika orang tersebut melakukan genocide atau kejahatan yang melawan kemanusiaan. Ketiga, kebenaran hanya akan menjadi “sejati” ketika dia dinyatakan secepatnya. Pada akhirnya, baik pelaku maupun korban dan keluarga mereka akan mempunyai hak yang sama untuk memberikan kisah atau catatan mereka masing-masing sehingga publik dapat mengambil pelajaran dan juga belajar dari mereka sehingga terhindar dari hal yang sama di masa yang akan datang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah sebagai usaha untuk mencapai solusi damai dengan mengajak semua pihak yang bertikai, tanpa memandang perbedaan motif, latar belakang dan tujuan. Rekonsiliasi harus melibatkan berbagai jalan dalam memperbaiki dan mengenali hak dan harga diri dari tiap pihak yang bertikai sehingga semua pihak dapat melupakan masa lalu mereka dalam rangka meraih masa depan. Merujuk apa yang dikatakan Daan Bronkhorst, yakni sebuah rekonsiliasi harus terdiri dari empat elemen yaitu, investigasi,

mediasi, penyelesaian dan keputusan pengadilan.

Investigasi dilaksanakan ketika pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi tentang pihak-pihak yang melakukan kejahatan hak asasi manusia. Mediasi dibutuhkan sebagai sebuah usaha untuk membawa pihak-pihak yang bertikai bersama-sama di bawah bantuan mediator lokal atau internasional. Penyelesaian melibatkan usaha untuk merehabitasi dan memberikan kompensasi kepada para korban. Keputusan pengadilan akan berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan dalam tindakan hukum lebih lanjut bagi para pelaku yang dapat dibawa ke pengadilan atas kejahatannya di masa lalu (Sulistiyanto, 2003: 65).

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah Komisi Kebenaran memiliki keuntungan dibandingkan dengan pengadilan biasa dalam menghadapi kejahatan di masa lalu. Komisi kebenaran sangat berguna pada sebuah transisi, karena dia dapat mencegah proses pengadilan berkepanjangan yang sangat merugikan. Komisi kebenaran bukanlah sebuah institusi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sehubungan dengan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama dia memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil langkah-

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

langkah hukum. Sebuah komisi kebenaran akan berada pada posisi yang lebih baik pada penyampaian isu-isu yang berhubungan dengan pengampunan dan keadilan retributif (*retributive justice*). Sebagai contoh, amnesti tidak akan diberikan kepada pelaku yang tidak mau mengakui kejahatan mereka di masa lalu. Demikian pula komisi akan merekomendasikan bahwa seorang korban dapat memperoleh kompensasi dan rehabilitasi sebagai bagian pengembalian harga diri mereka sebagai bagian penguatan proses rekonsiliasi.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia

Sebenarnya semangat rekonsiliasi telah dipertimbangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pementapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bab V (Kaidah Pelaksanaan poin 3):

Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga yang ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran

dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakkan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Selain itu pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.

Untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai yang diamanatkan oleh pasal 47 ayat (2) UU 26/2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain amanat tersebut, pembentukan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pementapan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Persatuan dan Kesatuan Nasional yang menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dalam undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan UU 27/2004 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menurut pasal 1 angka 3, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Menurut pasal 3 ditentukan bahwa pembentukan komisi adalah:

1. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan
2. Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Selain bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000, komisi ini juga melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan

kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakkan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui KKR dapat mendatangkan banyak manfaat, antara lain proses penyelidikan penuntutan dan persidangan tidak akan berlarut-larut dan dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dicapai apabila KKR tersebut dapat menyelesaikan perkara-perkara Pelanggaran HAM itu seobyektif mungkin dan seadil-adilnya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Oleh karena itu anggota KKR harus terdiri dari orang-orang yang betul-betul mempunyai integritas moral yang tinggi, mempunyai pengetahuan dan kepedulian terhadap hak asasi manusia dan bebas dari keterkaitan masa lalu/masa pemerintah orde baru (Abddullah dan Syamsir, 2002: 69).

Pasal 5 UU 27/2004 menentukan Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas Pelanggaran HAM dan melaksanakan rekonsiliasi. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Komisi mempunyai tugas:

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
 2. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
 4. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
 5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 6. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan
 7. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, Komisi memiliki wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7, yaitu:

1. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri;
3. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di

Memperhatikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, undang-undang telah memberikan wewenang yang sudah memadai sebagai suatu institusi yang ekstra yudisial dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan bahkan dalam hal-hal tertentu Komisi juga dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa. Secara kelembagaan Komisi terdiri dari beberapa sub komisi, yaitu sub komisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sub komisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dan sub komisi pertimbangan amnesti.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Sebagai suatu kelembagaan yang mempunyai wewenang ekstra yudisial dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu peranannya juga tergantung dari para anggota dari komisi tersebut yang disebut sebagai komisioner, yang keanggotaannya diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan kualifikasi dari seorang komisioner didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan diantaranya memiliki pengetahuan atau kepedulian di bidang hak asasi manusia, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu seleksi juga didasarkan atas pertimbangan: geografi, etnis, agama, dan kepakaran. Dengan demikian keanggotaan KKR diharapkan akan merupakan suatu kelembagaan yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang memadai dalam menjalankan fungsinya.

Ketentuan dalam UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Pengadilan HAM. Di dalam ketentuan, KKR tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses:

1. Pengungkapan kebenaran;

2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban yang merupakan ahli warisnya; dan
3. Pertimbangan amnesti, yang kesemuanya diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh KKR, pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM harus diidentifikasi. Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku Pelanggaran HAM dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden, setelah memperoleh pertimbangan dari KKR. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Namun apabila amnesti ditolak maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Selanjutnya, apabila terhadap Pelanggaran HAM yang telah diputus

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

oleh KKR, maka Pengadilan HAM ad hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan amnesty ditolak oleh Presiden. Demikian pula sebaliknya, terhadap Pelanggaran HAM yang sudah diberi putusan oleh Pengadilan HAM ad hoc, maka KKR tidak berwenang memutuskan. Dengan demikian, putusan KKR atau putusan Pengadilan HAM ad hoc bersifat final dan mengikat.

Saat ini sedang diusulkan para calon Komisioner sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan pasal 33 yang menentukan; untuk pertama kali seleksi pemilihan anggota komisi dilakukan oleh Presiden, dan selanjutnya akan disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jumlah komisioner menurut ketentuan undang-undang adalah 21 orang, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama segera dapat dilantik, karena sebenarnya kalau menurut ketentuan undang-undang seharusnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya undang-undang tentang KKR harus sudah terbentuk. Dengan demikian komisi segera dapat menjalankan aktivitasnya dalam rangka menuntaskan persoalan Pelanggaran HAM masa lalu, yang memang sudah ditunggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyelesaian dengan KKR memang bukanlah penyelesaian menurut hukum,

melainkan merupakan penyelesaian secara alternatif yang dilakukan oleh kelembagaan ekstra yudisial khusus terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dan hal ini dilakukan berdasarkan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Dengan demikian penyelesaian semacam ini juga akan mempertimbangkan nilai keadilan, yaitu dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dalam hal mendapatkan kepastian dalam penyelesaiannya terhadap Pelanggaran HAM bagi korban.

Sudah barang tentu cara penyelesaian semacam ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengacu pada mekanisme yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dan penyelesaian semacam ini juga dilakukan di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan dan Amerika Latin, yang mengalami Pelanggaran HAM oleh rejim yang sebelumnya, sehingga dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pembebasan kepada pelakunya (*impunity*).

Penutup

Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penyelesaian terhadap pelanggaran hak

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

asasi manusia yang berat pada masa lalu tetap harus dilakukan, walaupun dalam penyelesaiannya menggunakan cara alternatif, yaitu dengan menggunakan lembaga ekstra yudisial yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam UU 27/2004. Adapun pembentukan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya Pelanggaran HAM terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.
2. Penyelesaian menyeluruh terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM sangat urgen untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya.
3. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa sebelum UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Rozali, dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Effendi, A.Masyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V Tahun 2000.
- Laporan HAM Tahun 2005.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2001).

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

Robertson, Geoffrey, *Kejahatan terhadap KEMANUSIAAN – Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: Komnas HAM, 2002).

Sulistiyanto, Priyambudi, "Politik Rekonsiliasi di Indonesia: Menuntut, Memaafkan dan Melupakan?" dalam *Dignitas* (Jurnal Hak Asasi Manusia), ELSAM, Jakarta, 2003.

Suryokusumo, Sumaryo, "Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional," Makalah pada Dialog antara Pemerintah RI dan Norwegia Mengenai Hak Asasi Manusia, Jakarta, 4-5 Mei 2004.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PETUNJUK BAGI PENULIS

Redaksi menerima naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk makalah:

- Naskah belum pernah dipublikasikan penerbit lain
- Naskah disertai biodata singkat penulis
- Naskah meliputi gagasan, hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, dan komentar kritis tentang tokoh HAM
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik dan benar
- Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto, panjang sekitar 10 halaman dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* (*file*)
- Naskah ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris bila naskah berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bila berbahasa Inggris), kata-kata kunci, latar belakang, tujuan dan lingkup tulisan, kerangka teoritik, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
- Tabel, gambar, grafik diberi nomor urut, judul (di atas) dan sumber (di bawah)
- Kutipan dengan sistem *running note*, nama penulis, tahun, halaman
Contoh 1 : (Suwondo, 2006:123)
Contoh 2 : menurut Suwondo (2006:123)
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis seperti contoh berikut:
Adart, Walter R., *What Democracy Mean to the Greeks* (Madison: University of Winconsin Press, 1965)
Alford, C. Fred, "The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis," *Canadian Journal of Political Science* 18 (2): 295-312.
Benn, Stanley I., "Egalitarianism and the Equal Consideration of Interest," dalam J.R. Pennock and J.W. Chapman, eds., *Equality* (New York: Antherton Press), 61-78.
Suwondo, J., *Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998)

Redaksi berhak mengedit/menyunting naskah yang masuk tanpa merubah makna aslinya.

Untuk resensi buku:

- Buku yang direSENSI adalah yang membahas HAM
- Disertakan *copy* sampul depan dari buku yang direSENSI
- Disertakan informasi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN
- Naskah disertai biodata singkat penulis

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS SURABAYA**

Gedung Perpustakaan Universitas Surabaya Lt. 5
Jl. Rayakalirungut Surabaya
Telp. 031 298 1345
